

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan, serta meningkatkan hubungan ekonomi regional melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder. Dengan demikian, arah pembangunan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dengan pemerataan yang lebih baik (BPS, 2024). Pembangunan dipandang sebagai proses multidimensi yang mencakup perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi nasional, termasuk mengejar percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.

Tujuan pembangunan ekonomi secara makro adalah untuk meningkatkan dan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, yang antara lain bertujuan untuk pemerataan dan stabilitas. Pembangunan ekonomi dapat ditentukan oleh laju pertumbuhan ekonomi. Artinya, pembangunan ekonomi tidak lepas dari peningkatan kemampuan ekonomi dari manusia yang menjadi penggerak pembangunan itu sendiri (Hasan & Aziz, 2018).

Indikator yang menggambarkan kemajuan suatu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebesar 5,06%, dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

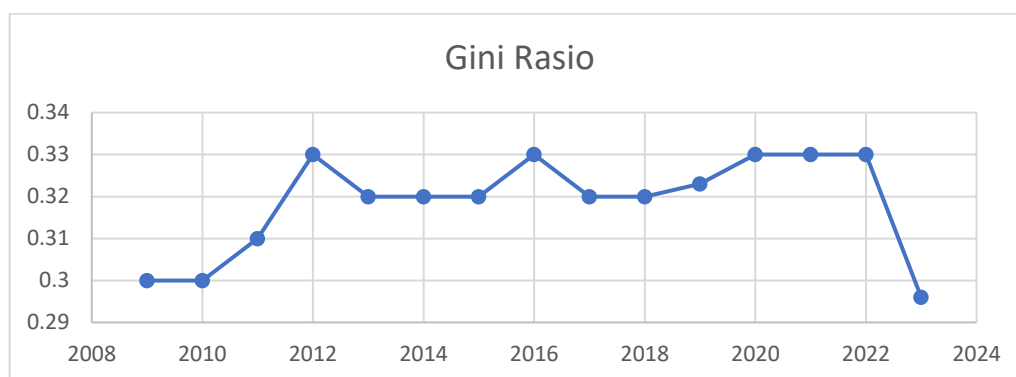
(ADHB) mencapai Rp20.533 triliun rupiah, dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar Rp12.439 triliun rupiah (BPS, 2024).

Dalam konteks global, pembangunan ekonomi juga dihubungkan dengan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs yang diluncurkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 mencakup 17 tujuan utama yang salah satunya adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk tujuan 1, mengurangi ketimpangan tujuan 10, serta mempromosikan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tujuan 8. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sejalan dengan pencapaian target SDGs, pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu mendukung pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan perlindungan lingkungan (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2015).

Pembangunan ekonomi berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Pembangunan ekonomi dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi juga mempercepat pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berarti peningkatan produksi barang dan jasa dalam masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan kemakmuran masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga menjadi kunci tujuan ekonomi makro, karena menyediakan lapangan kerja, memenuhi kebutuhan yang terus meningkat, dan mendukung pemerataan pendapatan (Astuti et al., 2017).

Meskipun pertumbuhan ekonomi di Aceh cukup stabil, masalah pemerataan pendapatan masih menjadi tantangan besar. Ketimpangan pendapatan terjadi ketika distribusi pendapatan tidak merata di kalangan masyarakat, yang menghambat upaya pengentasan kemiskinan. Ketimpangan pendapatan di Indonesia dapat dilihat

berdasarkan indikator atau suatu indeks ketimpangan pendapatan yang salah satunya adalah gini rasio.



Sumber : BPS, (2024)

Grafik 1. 1 Gini Aceh 2009-2023

Grafik 1.1 menunjukkan bahwa gini rasio, yang menggambarkan ketimpangan pendapatan, memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi, khususnya di Aceh. Ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena sebagian besar pendapatan terkonsentrasi pada kelompok kecil masyarakat. Hal ini dapat mengurangi daya beli dan konsumsi masyarakat luas, yang merupakan salah satu faktor utama perekonomian.

Pada periode 2009 hingga 2023, penurunan bertahap gini rasio di provinsi Aceh di desa maupun kota, menunjukkan bahwa distribusi pendapatan semakin merata. Hal ini berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi karena lebih banyak individu memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya ekonomi.

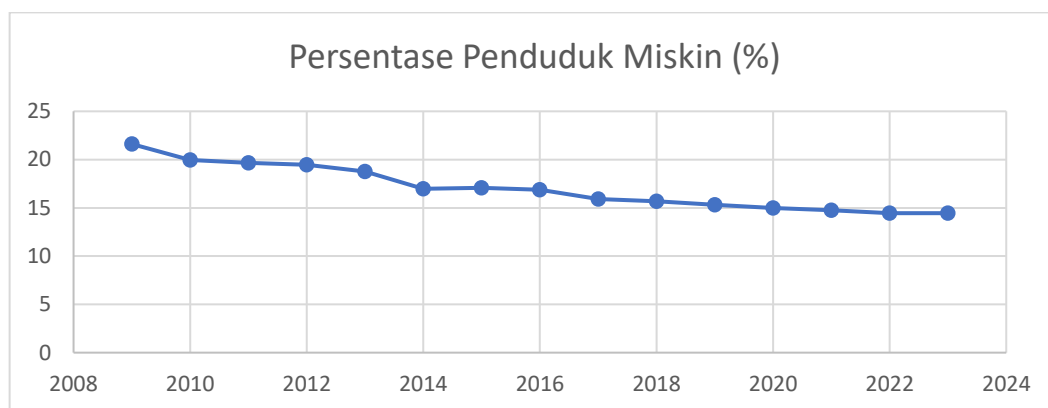
Tabel 1. 1 Gini Rasio Provinsi Aceh

Tahun	Total %
2008	0.3
2009	0.3
2010	0.3
2011	0.31
2012	0.33
2013	0.32
2014	0.32
2015	0.32
2016	0.33
2017	0.32
2018	0.32
2019	0.323
2020	0.33
2021	0.33
2022	0.33
2023	0.296

Secara keseluruhan, penurunan gini rasio dari 0.3% pada tahun 2008 menjadi 0.296% pada tahun 2023 menunjukkan perbaikan distribusi pendapatan, yang turut mendukung pertumbuhan ekonomi di Aceh. Dengan perbaikan distribusi pendapatan, lebih banyak orang memiliki akses ke pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi tanpa disertai peningkatan kesempatan kerja dapat menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan dan peningkatan kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS, (2024) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (Yuniarti et al., 2020) , hal ini dapat di lihat pada grafik di bawah ini :



Sumber : BPS, (2024)

Grafik 1. 2 Tingkat Kemiskinan Di Aceh 2020-2024

Grafik 1.2 data dari Badan Pusat Statistik (BPS), terlihat bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Aceh mengalami fluktuasi dari Pada tahun 2008, persentase penduduk miskin di Aceh berada di angka 23,55%. Angka ini terus menurun hingga mencapai 18,77% pada tahun 2013. Setelah itu, Aceh menunjukkan tren penurunan kemiskinan yang lebih stabil, dengan persentase turun menjadi 16,89% pada tahun 2016, dan terus menurun lagi hingga 14,45% pada tahun 2023.

Periode pandemi COVID-19 pada tahun 2020 tampaknya tidak berdampak signifikan pada tren penurunan persentase kemiskinan di Aceh, karena data menunjukkan bahwa angka kemiskinan tetap stabil, yaitu di sekitar 14,99% pada tahun tersebut. Pasca-pandemi, angka ini melanjutkan penurunan hingga mencapai angka terendah selama periode analisis, yaitu 14,45% pada tahun 2023. Secara

keseluruhan, data ini mencerminkan adanya perbaikan ekonomi di Provinsi Aceh yang berdampak positif terhadap pengurangan tingkat kemiskinan.

Tabel 1. 2 Tingkat Kemiskinan

Tahun	Persentase Penduduk Miskin (%)
2008	23.55
2009	21.61
2010	19.95
2011	19.65
2012	19.46
2013	18.77
2014	16.98
2015	17.08
2016	16.89
2017	15.92
2018	15.68
2019	15.32
2020	14.99
2021	14.75
2022	14.45
2023	14.45

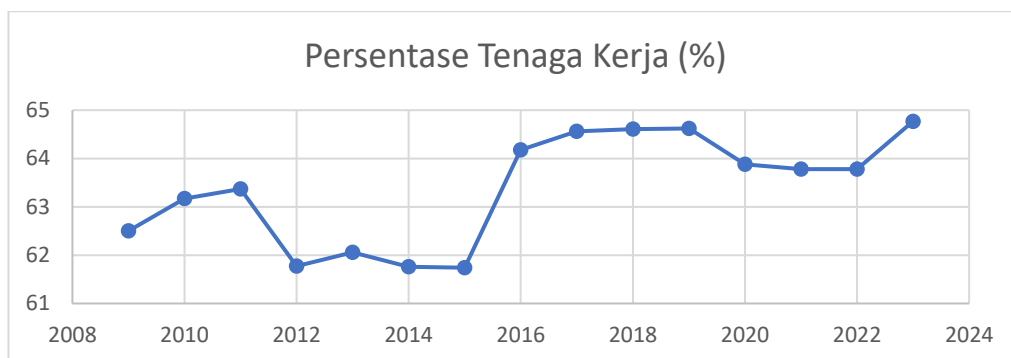
Penurunan ini menunjukkan adanya upaya dan kebijakan yang berhasil menstabilkan kondisi ekonomi, meskipun ada tantangan besar seperti pandemi. Secara keseluruhan, tren yang terlihat menunjukkan perbaikan dalam kondisi sosial-ekonomi di Aceh, dengan angka kemiskinan yang cenderung menurun kembali setelah sempat mengalami peningkatan karena krisis kesehatan global.

Ketika kemiskinan meningkat, seperti yang terlihat selama pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi cenderung melambat karena berkurangnya daya beli masyarakat, hilangnya lapangan kerja, dan rendahnya aktivitas ekonomi. Sebaliknya, ketika pertumbuhan ekonomi pulih dan stabil, jumlah penduduk miskin

cenderung menurun, karena lebih banyak lapangan kerja tercipta, pendapatan masyarakat meningkat, dan konsumsi meningkat. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif memainkan peran penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan, sementara penurunan kemiskinan berkontribusi pada keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Tingkat kemiskinan yang tinggi sering kali mencerminkan adanya keterbatasan akses terhadap peluang kerja yang layak, pendidikan, dan pelatihan yang memadai, yang akan berdampak pada rendahnya partisipasi angkatan kerja dalam perekonomian.

Salah satu indikator penting dalam ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yang menunjukkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar tenaga kerja. Rendahnya TPAK dapat berimplikasi pada tidak optimalnya pertumbuhan ekonomi, karena sumber daya manusia yang tidak sepenuhnya terserap ke dalam pasar tenaga kerja.



Sumber : BPS, (2024)

Grafik 1. 3 Persentase Tenaga Kerja Provinsi Aceh Tahun 2018-2023

Data ini menunjukkan bahwa persentase tenaga kerja di Aceh relatif stabil dengan sedikit peningkatan dari tahun ke tahun. Sebelum pandemi, tren tenaga kerja

meningkat secara bertahap seiring dengan perkembangan ekonomi. Namun, pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan tenaga kerja di tahun 2020 karena dampak ekonomi yang signifikan. Pada tahun-tahun berikutnya, Aceh mulai pulih, dengan persentase tenaga kerja kembali meningkat.

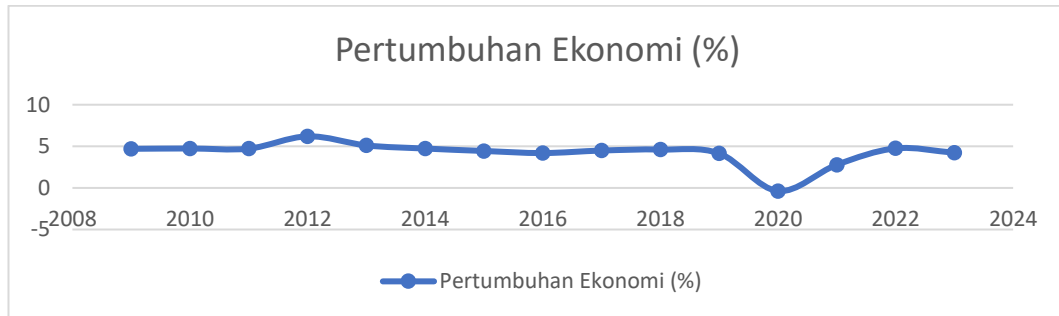
Tabel 1. 3 Persentase Tenaga Kerja Provinsi Aceh

Tahun	Persentase Tenaga Kerja (%)
2008	60.32
2009	62.5
2010	63.17
2011	63.37
2012	61.77
2013	62.06
2014	61.76
2015	61.74
2016	64.18
2017	64.56
2018	64.61
2019	64.62
2020	63.88
2021	63.78
2022	63.78

Meningkatnya ketergantungan pada sektor informal selama masa pemulihan ekonomi pasca-pandemi, daya dorong ekonomi menjadi lebih rentan terhadap guncangan. Sektor informal cenderung memiliki produktivitas yang lebih rendah dan kurang stabil, sehingga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh tidak sekuat sektor formal. Oleh karena itu, tren ini menjadi tantangan besar bagi Aceh untuk mempercepat pemulihan ekonominya.

Pada tahun 2023, perekonomian Aceh, yang diukur melalui PDRB atas dasar harga berlaku, mencapai Rp 227,11 triliun rupiah, dengan PDRB per kapita sebesar

Rp41,42 juta atau US\$2.718,57. Pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2023 tercatat sebesar 4,23%, (BPS, 2024). Dapat dilihat pada grafik dibawah.



Sumber: BPS, (2024)

Grafik 1. 4 Pertumbuhan Ekonomi Aceh 2009-2023

Grafik 1.4 menunjukkan secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh mengalami fluktuasi yang signifikan dalam periode 2008 hingga 2023. Meskipun menghadapi tantangan besar akibat pandemi COVID-19, Aceh menunjukkan kemampuan untuk pulih dan kembali ke jalur pertumbuhan positif. Pemulihan ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan di provinsi tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan membutuhkan dukungan dari kebijakan pemerintah dan investasi dalam infrastruktur serta sektor-sektor produktif.

Tabel 1. 4 Pertumbuhan Ekonomi

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2008	5.14
2009	4.7
2010	4.74
2011	4.72
2012	6.2
2013	5.11
2014	4.73
2015	4.44
2016	4.19

2017	4.49
2018	4.61
2019	4.15
2020	-0.37
2021	2.78
2022	4.75
2023	4.23

Pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, tingkat kemiskinan dan tingkat partisipasi Angkatan kerja adalah isu-isu yang selalu menarik untuk dipelajari. Berbagai studi sebelumnya mencoba untuk menjelaskan faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Meskipun penelitian yang dilakukan oleh (Budi & Yustie, 2020) telah menganalisis pengaruh tenaga kerja, IPM, dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Jawa Timur, penelitian tersebut masih memiliki beberapa keterbatasan yang membuka peluang bagi penelitian ini. Pertama, penelitian tersebut terbatas pada wilayah Jawa Timur, yang memiliki karakteristik ekonomi, sosial, dan budaya yang berbeda dengan Provinsi Aceh. Kondisi ekonomi di Aceh, yang dipengaruhi oleh sejarah konflik dan otonomi khusus, memberikan konteks yang berbeda dalam memahami pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi.

Provinsi Aceh sampai saat ini tentunya masih dihadapkan dengan ketimpangan pendapatan, masalah kemiskinan dan angkatan kerja, yang merupakan masalah pertumbuhan ekonomi yang umum dihadapi oleh setiap daerah. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui dan memahami lebih jauh mengenai masalah tersebut. Sehingga, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Tingkat**

Kemiskinan Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh?
2. Bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh?
3. Bagaimana pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh?
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh?
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan masukan dalam perkembangan ekonomi terkhususnya ilmu ekonomi pembangunan yang berguna untuk mengetahui kebijakan pemerintah Provinsi Aceh terhadap pengaruh tingkat kemiskinan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat sehingga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu mewujudkan suatu yang berguna:

- a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber informasi untuk pengembangan dan keterampilan, serta bisa menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki masalah-masalah yang ada dalam ketimpangan pendapatan, kemiskinan dan partisipasi Angkatan kerja.
- b. Bagi pemerintah, sebagai bahan masukan supaya adanya perhatian lebih dalam menganalisis mengenai ketimpangan pendapatan, tingkat kemiskinan dan tingkat partisipasi angkatan kerja.
- c. bagi peneliti yang ingin menjadikan salah satu referensi mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan ketimpangan pendapatan, tingkat kemiskinan dan tingkat partisipasi angkatan kerja akibat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.